

MODAL SOSIAL DAN KEMISKINAN

SOCIAL CAPITAL AND POVERTY

Ayu Diah Amalia

Puslitbang Kemensos RI
Jl. Dewi Sartika No. 200 Cawang Jakarta Timur
Email : amaliadahayu@gmail.com

Accepted : 15 November 2015 Revised : 20 Desember 2015 Approved : 31 December 2015

Abstract

The problem of poverty remains an interesting problem to discuss and look for solutions. Various strategies undertaken to overcome and reduce poverty, one possible strategy is to increase the social capital of the poor. This paper is a theoretical study and review of the literature on social capital and its relation to poverty reduction. Based on the results of the study some literature and concepts of social capital should be used in the development of policies to reduce poverty relation to the concept Katherine Rankin, that the appeal of social capital lies in its capacity to mobilize local social networks to address poverty.

Keywords : *social capital, poverty, welfare*

Abstrak

Masalah kemiskinan tetap menjadi masalah yang menarik untuk didiskusikan dan dicarikan penyelesaiannya. Berbagai strategi dilakukan untuk mengatasi dan mengurangi kemiskinan, salah satu strategi mungkin adalah dengan peningkatan modal sosial kelompok miskin. Tulisan ini merupakan kajian teori dan kajian literatur mengenai modal sosial dan kaitannya dengan pengurangan kemiskinan. Berdasarkan hasil kajian beberapa literatur dan konsep-konsep sebaiknya modal sosial banyak digunakan dalam kebijakan pembangunan untuk mengurangi kemiskinan kaitannya dengan konsep Katherine Rankin, bahwa daya tarik modal sosial terletak pada kapasitasnya untuk memobilisasi jaringan sosial lokal untuk mengatasi masalah kemiskinan misalnya program pendanaan mikro.

Kata kunci : *modal sosial, kemiskinan, kesejahteraan*

PENDAHULUAN

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) memperkirakan jumlah penduduk miskin di Indonesia akan bertambah 1,5 juta jiwa sampai akhir tahun ini. Penyebab lonjakan angka kemiskinan ini akibat perlambatan ekonomi dunia. Kepala Kajian Kemiskinan dan Perlindungan Sosial LPEM FEUI, Teguh Dartanto mengatakan kenaikan jumlah orang miskin periode September 2014-Maret 2015 mencapai 860 ribu jiwa. Sedangkan untuk angka September 2015 akan diumumkan oleh Badan Pusat Statistik

(BPS) pada akhir tahun ini. Teguh mengatakan estimasi kenaikan jumlah penduduk miskin sampai akhir tahun ini mencapai 1,2 juta-1,5 juta orang. Itu karena pelemahan ekonomi dunia dan penurunan harga komoditas. Untuk diketahui, BPS melaporkan jumlah penduduk miskin periode Maret 2015 sebanyak 28,59 juta jiwa baik di perkotaan maupun di pedesaan. Jika dibanding periode September 2014, angka penduduk miskin bertambah 27,73 juta orang. Kepala BPS Suryamin mengungkapkan basis penduduk miskin di Indonesia pada bulan ketiga ini sebesar 28,59 juta orang dengan prosentase 11,22 persen terhadap total penduduk

Indonesia. Angka tersebut mengalami kenaikan dari realisasi jumlah penduduk miskin di periode Maret dan September tahun lalu. Jumlah ini terjadi kenaikan 860 ribu orang miskin dibanding realisasi jumlah penduduk miskin sebesar 27,73 juta di September 2014. Sedangkan dibanding Maret 2014 yang 28,28 juta jiwa, angka orang miskin di Maret 2015 bertambah 310 ribu (Ariyanti, 2015).

Kemiskinan menjadi momok dalam masyarakat. Berbagai upaya dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan, tetapi angka kemiskinan tidak turun secara signifikan. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 diprediksi mencapai 30,25 juta orang atau sekitar 12,25 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Jika berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin pada tahun 2014, presentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 11,25 persen atau 28,28 juta jiwa, maka pada 2015 tambahan penduduk miskin sekitar 1,9 juta jiwa.

Menurut Ahmad, ketimpangan antara penduduk miskin dan penduduk kaya juga semakin terlihat jelas. Ahmad menjelaskan dari sisi pendapatan, masyarakat Indonesia terbagi atas tiga kelas. Kelas atas sebesar 20 persen, kelas menengah sebesar 40 persen, dan kelas paling bawah mencapai 40. Pada 2005, kelas terbawah menerima manfaat dari pertumbuhan ekonomi sebesar 21 persen, tetapi pada 2014 menurun menjadi 16,9 persen. Sementara untuk kelas atas, pada 2005 menerima 40 persen dan meningkat menjadi 49 persen dari PDB pada 2014. Menurut dia, jika tidak pemerataan, bukan tidak mungkin dalam kurun waktu 10 tahun koefisien Gini bisa mencapai 0,6 persen. Dia mengatakan, kondisi ini akan sangat berbahaya lantaran bisa menimbulkan revolusi sosial. Hal ini harus segera diatasi dengan meningkatkan pendapatan masyarakat yang paling bawah.

Deputi Bidang Kemiskinan Ketenagakerjaan dan UKM Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rahma Iryanti mengakui, tidak mudah mengentaskan kemiskinan lantaran kemiskinan kronis terus berlanjut.

Berbagai upaya yang dilakukan ternyata masih banyak masyarakat yang rawan miskin dan berpotensi kembali miskin sehingga pengentasan kemiskinan tak kunjung selesai. Berdasarkan data 60 juta keluarga miskin yang ada selama tahun 2008-2010, sekitar 1,5 juta rumah tangga miskin berhasil keluar dari kategori miskin tetapi masih rentan terhadap kemiskinan. Sebanyak 2,1 juta keluarga miskin berhasil keluar dari kategori sangat miskin tetapi tetap miskin.

Sebanyak 0,9 juta keluarga miskin berhasil keluar dari kondisi sangat miskin tetapi jatuh lagi dalam kemiskinan. Sementara, 1,5 juta keluarga miskin masih berada dalam kemiskinan yang kronis. Dia mengatakan, ada program prioritas wajib, yakni sektor; pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang terus dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan antara penduduk miskin dan kaya. Diakuinya perlu usaha yang luar biasa untuk mengentaskan kemiskinan. Banyaknya program yang belum tepat sasaran menjadi beberapa faktor yang menyebabkan pengentasan kemiskinan menjadi hal yang tidak mudah. Belum lagi, Indonesia memiliki 100 kabupaten/kota yang indeks kesejahteraannya masih rendah. Berdasarkan data BPS, secara persentase penduduk miskin cenderung menurun, tetapi secara riil jumlah penduduk miskin terus bertambah. Hal itu setidaknya terlihat sejak tahun 2013. Pada tahun 2013, penduduk miskin 11,37 persen dengan jumlah mencapai 28,07 juta jiwa (Kelana, 2015).

Dalam hal ini, kemiskinan merupakan masalah social yang bersifat global. Artinya kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi dan menjadi perhatian banyak orang di dunia. Kemiskinan merupakan problema kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan dan peradaban (Suharto, 2013). Wacana kemiskinan di Indonesia tetap menjadi wacana yang menarik untuk dibincangkan dan dicarikan penyelesaiannya. Kemiskinan telah menjadi masalah kronik karna berkaitan dengan jurang pemisah dan pengangguran. Jadi pemecahannya pun harus berkaitan dan menyeluruh dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pelbagai persoalan kemiskinan masyarakat memang menarik untuk dilihat dari berbagai aspek sosial, ekonomi, psikologi dan politik. Aspek sosial utamanya akibat terbatasnya hubungan sosial (Tantoro, 2014).

Amartya Sen, mengatakan bahwa kemiskinan dinyatakan sebagai kekurangan atau ketidak mampuan serta apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan, termasuk didalamnya kekurangan material, ketidakmampuan fisik, serta dimensi sosial. Chambers mengungkapkan ada kelompok lain yang mengartikan kemiskinan dengan konsep yang luas, mencakup multidimensi kekurangan. Kemiskinan ini menggambarkan dua belas dimensi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan berhubungan. Keduabelas dimensi terdiri dari: 1) Dimensi pendidikan/kemampuan; 2) Dimensi institusi dan akses; 3) Dimensi waktu; 4) Dimensi musim; 5) Dimensi tempat tinggal/ lokasi; 6) Dimensi keamanan; 7) Dimensi ketidakmampuan fisik, 8) Dimensi material; 9) Dimensi hubungan social; 10) Dimensi hukum; 11) Dimensi kekuasaan politik; dan 12) Dimensi informasi (Maipta, 2014).

Bagong Suyanto mengemukakan empat usaha yang perlu dilakukan untuk

meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin yaitu; pertama, berupaya mengurangi ketergantungan dengan pihak lain. Kedua, berupaya mendapatkan bantuan untuk modal usaha. Ketiga, dasar harga bagi orang-orang miskin. Keempat, berupaya mengembangkan kemampuan untuk mempunyai kemahiran dan kepakaran. Sutinah mengemukakan strategi untuk mengurangi kemiskinan yang perlu dikembangkan yaitu: 1) Rangkaian sosial yang membentuk kerjasama untuk memenuhi keperluan hidup; 2) Strategi untuk mengatasi kesulitan yaitu dengan memperbagaikan sumber usaha untuk meningkatkan pendapatan; 3) Strategi untuk menghadapi masa depan yaitu dengan menabung, mengikuti latihan kemahiran, yang sesuai dengan keperluan pasar; 4) Strategi hidup hemat, dengan mengatur pola makan, belanja dan pola konsumtif (Suyanto dalam Todaro, 2014)

Berbagai strategi dan usaha dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan, namundalam tinjauan sosial bagaimana mengatasi masalah kemiskinan dilihat dari hubungan sosial sebagaimana yang telah diungkapkan Chambers bahwa salah satu dimensi kemiskinan adalah dimensi hubungan sosial. Berbicara mengenai hubungan sosial salah satu yang dapat dikaitkan dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah mengenai modal sosial. Bagaimana kaitan modal sosial dalam mengatasi kemiskinan? Akan dibahas dalam tulisan ini dengan menggunakan metode study literature dan teori-teori. Lingkup tulisan ini dibatasi pada masalah hubungan sosial yang merupakan modal sosial dan kaitannya dengan kemiskinan sebagaimana yang dikatakan Sutinah bahwa untuk mengatasi kemiskinan perlu dikembangkan strategi ; rangkaian sosial yang membentuk kerjasama untuk memenuhi keperluan hidup.

PEMBAHASAN

Kemiskinan

Kemiskinan juga dapat dilihat dari standard hidup layak, artinya kita melihat seseorang atau suatu keluarga mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Lebih lanjut diartikan bahwa kemiskinan adalah kondisi dimana tidak terpenuhinya kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar sehingga standard hidup layak tidak tercapai. Kebutuhan dasar yang dimaksud seperti makanan, pakaian, rumah atau tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan seperti ini sering juga disebut dengan kemiskinan absolut.

Para ahli membuat pengertian atau definisi dari kemiskinan dengan berbagai versi. Kemiskinan dapat berupa gambaran kekurangan dari sisi materi, kurangnya kebutuhan social, pendapatan, akses terhadap sumber-sumber tertentu, dan lainnya. Berbagai teori yang telah dikembangkan dalam upaya untuk memahami aspek-aspek yang menentukan terjadinya kemiskinan secara lebih mendalam. Keanekaragaman teori yang telah dikembangkan itu menggambarkan adanya perbedaan sudut pandang diantara pemerhati kemiskinan. Secara umum teori-teori yang menjelaskan mengapa kemiskinan terjadi, dapat dibedakan menjadi teori yang berbasis pada pendekatan ekonomi dan teori yang berbasis pada pendekatan sosiologi-antropologi (non ekonomi), khususnya tentang budaya masyarakat. Teori yang berbasis pada teori ekonomi antara lain melihat kemiskinan sebagai akibat dari kesenjangan kepemilikan faktor produksi, kegagalan kepemilikan, kebijakan yang bias, perbedaan kualitas sumber daya manusia, serta rendahnya pembentukan modal masyarakat atau rendahnya rangsangan untuk penanaman modal. Di sisi lain, pendekatan sosio-antropologis menekankan adanya pengaruh budaya yang cenderung

melanggengkan kemiskinan (kemiskinan kultural), seperti budaya menerima apa adanya.

Perspektif sosiologis, memandang kemiskinan ber sumber dari ketidakadilan structural. Hal ini didasarkan pada pengamatan bahwa walaupun sumber daya telah dialirkan ke sektor-sektor yang didominasi oleh kaum miskin, namun karena hambatan structural, mereka tetap tidak dapat mengambil keuntungan penuh dari kebijakan tersebut. Sebagai contoh, meskipun pemerintah telah mengalokasikan banyak dana serta membuat kebijakan pembangunan rumah bagi kaum miskin, namun banyak masyarakat miskin tidak dapat menikmatinya karena keterbatasan akses terhadap perbankan. Hambatan structural seperti struktur kekuasaan, birokrasi, ketidakadilan dan ketidakberpihakan, serta kebijakan makro yang tidak tuntas telah menghambat para kaum miskin untuk mendapatkan akses terhadap perbankan, kesehatan, pendidikan, keterampilan kemiskinan dan lainnya. Oleh karena itu focus dari perspektif ini adalah perluasan akses masyarakat miskin terhadap sector-sektor yang dapat memberdayakan mereka menuju tangga sosial yang lebih tinggi guna mengurangi kemiskinan (Maipta, 2014).

Secara konseptual, kemiskinan bisa diakibatkan oleh empat faktor yaitu: a) faktor individual. Terkait dengan aspek patologis termasuk kondisi fisik dan psikologis si miskin, orang miskin disebabkan oleh perilaku, pilihan atau kemampuan dari si miskin itu sendiri dalam menghadapi kehidupannya; b) faktor sosial. Kondisi-kondisi lingkungan sosial yang menjebak seseorang menjadi miskin, misalnya diskriminasi berdasarkan usia, gender, etnis yang menyebabkan seseorang menjadi miskin. Termasuk dalam faktor ini adalah kondisi sosial dan ekonomi keluarga si miskin yang biasanya menyebabkan kemiskinan antar generasi; c) faktor kultural. Kondisi atau kualitas budaya

yang menyebabkan kemiskinan. Faktor ini secara khusus sering menunjuk pada konsep kemiskinan kultural atau budaya kemiskinan yang menghubungkan kemiskinan dengan kebiasaan hidup atau mentalitas; d) faktor structural. Menunjuk pada struktur atau sistem yang tidak adil, tidak sensitif dan tidak *accessible* sehingga menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin (Suharto, 2013).

Kemiskinan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Menurut sejarah, keadaan kaya dan miskin secara berdampingan tidak merupakan masalah sosial sampai saatnya perdagangan berkembang dengan pesat dan timbulnya nilai-nilai sosial yang baru. Berkembangnya perdagangan ke seluruh dunia dan ditetapkannya taraf kehidupan tertentu sebagai suatu kebiasaan masyarakat, kemiskinan muncul sebagai masalah sosial. Pada waktu itu individu sadar akan kedudukan ekonominya sehingga mereka mampu untuk mengatakan apakah dirinya kaya atau miskin. Kemiskinan dianggap sebagai masalah sosial apabila perbedaan kedudukan ekonomis para warga masyarakat ditentukan secara tegas. (Soekanto, 2012; 320)

Kewenangan masyarakat untuk melakukan upaya penanganan masalah sosial tidak akan efektif apabila masyarakat tidak mempunyai kapasitas guna melakukannya. Praktik kehidupan dalam keseharian ternyata masyarakat telah banyak melakukan upaya penanganan masalah sosial. Berbagai pola penanganan mereka peroleh melalui proses belajar sosial yang berlangsung dalam dinamika interaksi dan relasi sosialnya. Pada umumnya masyarakat mampu melakukan hal-hal seperti itu karena dalam masyarakat sendiri tersimpan

modal sosial, yang seperti halnya dengan modal fisik dan finansial dapat digunakan sebagai energy penggerak tindakan bersama termasuk dalam menangani masalah sosial dalam hal ini kemiskinan. Modal sosial dapat diidentifikasi dalam bentuk solidaritas sosial yang bersumber dari kesadaran kolektif, saling percaya, asas timbal balik dan jaringan sosial (Soetomo, 267-269). Modal sosial memiliki peran yang sama pentingnya dengan modal fisik, modal finansial dan modal keterampilan, kepandaian atau kecerdasan (*human capital*). Modal sosial mempunyai energy yang dapat memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengembangkan usaha (Usman, 2015; 75).

Modal Sosial

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, Chamber menyebutkan salah satu dimensi kemiskinan adalah dimensi hubungan sosial. Sejauhmana hubungan sosial yang merupakan modal sosial berperan dalam menangani kemiskinan, akan dibahas terlebih dahulu mengenai konsep modal sosial.

Definisi Putnam tentang modal sosial pada tahun 1996 menyatakan bahwa modal sosial adalah bagian dari kehidupan sosial-jaringan, norma dan kepercayaan-yang mendorong partisipan bertindak bersama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan tujuan bersama. Gagasan inti dai teori modal sosial adalah bahwa jaringan sosial memiliki nilai, kontak sosial mempengaruhi produktivitas individu dan kelompok. (Field, 2014; 51). Teori modal sosial pada intinya dapat diringkas dalam dua kata soal hubungan. Membangun hubungan dengan sesama, dan menjaganya agar terus berlangsung sepanjang waktu, orang mampu bekerja bersama-sama untuk mencapai berbagai hal yang tidak dapat mereka lakukan sendirian, atau yang dapat mereka capai tapi dengan susah payah. Orang berhubungan melalui serangkaian jaringan dan

mereka cenderung memiliki kesamaan nilai dengan anggota lain dalam jaringan tersebut; sejauh jejaring tersebut menjadi sumber daya, dia dapat dipandang sebagai modal. Selain bisa memberikan manfaat langsung, modal-modal ini seringkali bisa dimanfaatkan dalam latar yang lain. Keanggotaan jaringan dan seperangkat nilai bersama menjadi inti dari konsep modal sosial. (Field, 2014; 5).

Putnam mendefinisikan modal sosial sebagai bagian dari organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma, dan jaringan, yang dapat memperbaiki efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan terkoordinasi (Putnam, 1993a:169). Temuan-temuan penelitian menunjukkan bahwa modal sosial dapat menjadi menyeimbangkan kemalangan ekonomi dan sosial (Field, 2014; 75). Beberapa bentuk pemikiran Jalan Ketiga menyajikan modal sosial sedikit banyak secara eksplisit sebagai alternatif atas kebijakan kesejahteraan demokrat sosial (Field, 2014; 196). Man Wann (1995) mengusulkan strategi membangun modal sosial untuk menciptakan sistem kesejahteraan yang didasarkan atas prinsip subsidi, melalui dukungan publik secara aktif bagi kelompok swadaya dan bantuan timbal balik. (Wann, 1995). (Field, 196-197)

Uphoff (dalam Dasgupta & Serageldin, 2000: 215) menyatakan bahwa modal sosial dapat dibedakan dalam dua kategori; fenomena kognitif dan struktural. Dalam fenomena kognitif modal sosial tumbuh dari proses mental dan hasil pemikiran yang diperkuat oleh budaya termasuk nilai dan norma. Pada tingkat abstrak perwujudannya dapat berbentuk gagasan (*ideas*). Apabila gagasan tersebut diterima oleh kalangan luas masyarakat, misalnya karena disadari manfaatnya, maka kemudian akan menjadi acuan dalam pola pikir dan pola tindak masyarakatnya termasuk dalam

merespons masalah sosial. Dalam bentuk yang lebih operasional *ideas* ini dapat diturunkan dalam bentuk ideal yang merupakan harapan dan kepentingan bersama dalam masyarakat. Bentuk modal sosial ini dapat menjadi pendorong tindakan bersama masyarakat dan kepedulian sosial bagi sesama warga masyarakat. Dimensi struktural fenomena modal sosial terkait dengan organisasi sosial dan institusi sosial yang di dalamnya terkandung peranan, aturan dan prosedur yang dapat membentuk jaringan yang luas dalam mendorong kerjasama. Dalam banyak hal modal sosial yang berbentuk fenomena struktural ini dapat berfungsi memfasilitasi *ideas* dan ideal agar dapat teraktualisasi melalui berbagai bentuk tindakan bersama warga masyarakat. (Soetomo, 268)

Sedangkan, prinsip-prinsip yang mengendap dalam modal sosial ; pertama, mengembangkan *trust*. Kedua, mengembangkan *commitment* atau sikap tindakan yang saling menjaga atau melindungi, relasi membentuk jaringan sosial (*net*) yang diikat oleh hubungan pertemanan (*friendship*), kekeluargaan (*kindship*), ketetanggaan dan melembagakan hubungan tatap muka (*face to face relationship*). Bentuk hubungan semacam ini, mereka merasa senasib dan sepenanggungan, karena itu di antara mereka terdapat komitmen untuk saling menjaga dan melindungi satu sama lain. Ketiga, mengembangkan *reciprocity* atau sikap dan tindakan saling memberi keuntungan satu sama lain. Elemen-elemen penting yang terendap dalam modal sosial tersebut antara lain adalah *trust*, *commitment* dan *reciprocity*. Sebagaimana modal fisik, modal finansial dan modal keterampilan, kecerdasan atau kepandaian, modal sosial dapat dikelola untuk mendukung perilaku yang inovatif dan produktif (Usman, 2015; 70-71)

Modal Sosial dan kaitannya dengan Kemiskinan

Dalam hal ini setiap masyarakat memiliki modal sosial. Perbedaannya terletak pada besar kecilnya dan variasi kandungannya. Perbedaan lain juga terletak pada identifikasinya, ada masyarakat yang modal sosialnya sudah banyak teridentifikasi dan dimanfaatkan, sementara dalam masyarakat lain masih banyak yang belum dioptimalkan (Soetomo, 2010; 268). Realitas kehidupan, pemanfaatan modal sosial guna penanganan sosial (kemiskinan) oleh masyarakat dapat dilihat dari beberapa bentuk. Diantaranya yang banyak dijumpai adalah dalam bentuk tindakan bersama untuk meningkatkan kualitas hidup, pemberian jaminan sosial kepada warga masyarakat dan minimalisasi serta penyelesaian konflik sosial. Bentuk yang lain, terutama dilihat dari upaya untuk mengantisipasi masalah sosial, modal sosial yang berupa solidaritas sosial, rasa saling percaya dan asas timbal balik dapat mendorong berbagai bentuk tindakan yang merupakan cerminan kepedulian sosial. Masyarakat tertentu aktivitas itu bukan saja sudah melembaga akan tetapi juga ditata dan diorganisasi dengan baik. Sebagai contoh kasus, ditemukan adanya institusi lokal yang mengorganisasi dan mengelola pemberian beasiswa untuk anak keluarga miskin di lingkungan komunitasnya dengan dana yang berasal dari anggota masyarakat lain yang kebetulan kondisi kehidupannya lebih baik dan bersedia secara sukarela menyisihkan uangnya. Kentuknya yang lain, keberadaan modal sosial terutama apabila dikelola dengan baik dapat digunakan untuk memelihara integrasi sosial dalam masyarakat, termasuk yang kondisinya sudah semakin kompleks dengan variasi kepentingan yang kompleks pula. Bentuk yang senafas dengan realitas itu, modal sosial juga dapat berpotensi untuk mengeliminasi konflik sosial. Dalam kondisi tertentu, sering dijumpai

bahwa walaupun masyarakat kompleks di dalamnya terkandung solidaritas sosial yang tidak eksklusif akan tetapi bersifat inklusif lintas kelompok. Disamping itu tidak jarang dijumpai masyarakat yang berhasil membangun pranata bersama yang memayungi seluruh kelompok. Dalam bentuk yang lain walaupun belum terbangun pranata bersama, tidak jarang nilai-nilai pada masing-masing kelompok juga sudah mengandung inklusivitas, yang mengajarkan penghargaan dan penerimaan kepada orang dari kelompok lain (Soetomo, 2010; 271-272).

Modal sosial dapat tumbuh dengan subur dan bertahan dalam durasi waktu yang lama apabila memperoleh dukungan aktor, dirajut dengan ikatan sosial yang jelas, dan dikembangkan melalui institusi sosial yang di dalamnya terendap relasi-relasi multi dimensi. Sebaliknya modal sosial menjadi lemah dan tidak bisa bertahan lama ketika tidak ada komitmen kuat para aktor, basis ikatan sosial yang kabur dan dipelihara melalui institusi sosial dengan relasi-relasi yang mono dimensi.

Pembahasan tentang modal sosial sebetulnya tidak selamanya berkaitan dengan kegiatan ekonomi kreativitas dan produktivitas yang berhubungan dengan perdagangan. Satu hal yang sama-sama terendap didalamnya adalah sebuah energi atau kekuatan yang mampu meningkatkan kapasitas adaptif di kalangan masyarakat, sehingga tidak larut dalam kepedihan akibat dampak negative yang timbul dari perubahan lingkungan hidup, energi itu mengalir melalui jejaring yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat sipil. Energi itu mengikuti rules, sumber daya (*resources*), dan strategi menanggung resiko (*risk strategy*) yang menekan dalam kehidupan masyarakat sipil. Hasil kajian pada umumnya memperlihatkan bahwa dalam modal sosial terendap elemen-elemen yang berperan amat signifikan dalam memacu sikap dan tindakan inovatif dan produktif.

Satu bentuk tindakan bersama tersebut adalah upaya peningkatan taraf hidup masyarakat termasuk upaya untuk mengurangi kemiskinan. Dalam hal ini tindakan bersama tadi dapat berupa berbagai usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan. Kemunculan berbagai kelompok usaha produktif dalam masyarakat baik yang tumbuh atas prakarsa masyarakat sendiri maupun yang diinisiasi dari luar merupakan contohnya. Tidak jarang berbagai tindakan bersama yang bersifat produktif tadi diputuskan dan dirancang bersama berdasarkan masalah dan kebutuhan yang diidentifikasi bersama melalui institusi local (Usman, 2015; 68-69, 75-77).

Modal sosial mirip dengan bentuk-bentuk modal lainnya, dalam arti, ia juga bersifat produktif. Modal sosial dapat dijelaskan sebagai produk relasi manusia satu sama lain, khususnya relasi yang intim dan konsisten. Modal sosial menunjuk pada jaringan, norma dan kepercayaan yang berpotensi pada produktivitas masyarakat. Namun demikian, modal sosial berbeda dengan modal finansial, karena modal sosial bersifat kumulatif dan bertambah dengan sendirinya (*self-reinforcing*) (Putnam, 1993). Karenanya, modal sosial tidak akan habis jika dipergunakan, melainkan semakin meningkat. Rusaknya modal sosial lebih sering disebabkan bukan karena dipakai, melainkan karena ia tidak dipergunakan. Berbeda dengan modal manusia, modal sosial juga menunjuk pada kemampuan orang untuk berasosiasi dengan orang lain. Bersandar pada norma-norma dan nilai bersama, asosiasi antar manusia tersebut menghasilkan kepercayaan yang pada gilirannya memiliki nilai ekonomi yang besar dan terukur (Fukuyama, 2002). Terkait ini, ada tiga parameter modal sosial, yaitu kepercayaan (*trust*), norma-norma (*norms*) dan jaringan-jaringan (*networks*). Jika konsep modal sosial digunakan dalam upaya

penanggulangan kemiskinan, keterbatasan kapasitas dari efektivitas jaringan kerja (*networks*) yang dimiliki oleh kelompok masyarakat miskin harus menjadi perhatian. *Network* yang dimiliki masyarakat miskin tentu saja berbeda dengan *networks* yang dimiliki oleh masyarakat mampu, dan seringkali masyarakat miskin tidak diijinkan untuk bergabung dan terlibat dalam *networks* masyarakat mampu. Sebagai catatan, stratifikasi dalam kelas-kelas sosial terdapat pada seluruh kelompok masyarakat dimana masyarakat miskin berada pada level terbawah dari hirarki sosial, dan mengalami *sosial exclusion*

Eksistensi modal sosial memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pemerintah dan penyelenggaraan pemerintahan. Manfaat tersebut antara lain, pertama, dalam kinerja ekonomi, modal sosial mengurangi biaya transaksi dengan mengubah istilah-istilah dalam perdagangan; mengurangi secara besar-besaran biaya pengaturan kontrak; pengambilan keputusan yang lebih fleksibel; dan menghemat waktu (P. N. Wilson, 2000). Dengan kata lain, *trust*, reputasi dan sanksi informal merupakan pengganti yang lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan sistem legalitas dan sanksi formal. Sebagai contoh ketika orang-orang mempercayai dan dapat dipercaya, dan memelihara hubungan secara terus menerus, kegiatan bisnis harian menjadi lebih mudah dan bebas tekanan. Lebih lanjut, Putnam (1993) menambahkan bahwa jaringan sosial juga sebagai penyalur informasi yang berguna bagi pencapaian tujuan individual maupun kelompok. Pada umumnya, orang-orang yang memiliki jaringan sosial yang bagus, akan memperoleh informasi lebih dahulu, dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki jaringan sosial. Kedua, berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan,

modal sosial memiliki dampak positif terhadap kesehatan, dan terutama kesehatan mental, jaringan sosial yang dimiliki oleh individu adalah sebagai pelindung dari masalah-masalah kehidupan (Halpern, 2005). Modal sosial dapat memelihara norma-norma sosial dalam suatu komunitas dan mengurangi kecenderungan perilaku egois diantara anggota kelompok. Orang-orang yang memiliki hubungan yang baik dengan komunitasnya dan memiliki hubungan saling mempercayai, pada umumnya memiliki perilaku yang dapat diterima oleh kelompoknya (Lembaga Penelitian UNPAD, 2008).

Teori pembangunan ekonomi menekankan pentingnya uang dan mesin, tenaga kerja dan teknologi yang sehat dan terampil. Namun, perkembangan dan pertumbuhan spesialis tidak mengcover pentingnya kohesi sosial untuk masyarakat yang makmur secara ekonomi dan pembangunan untuk dapat berkelanjutan (Knack dan Keefer, 1997; Putnam, 1993). “ Modal sosial... membentuk dasar-dasar kemiskinan dan kemakmuran. “(Narayan 1997). Granovetter (1995) menggarisbawahi bahwa hampir semua perilaku ekonomi tertanam dalam jaringan hubungan sosial. Modal sosial dan kepercayaan dapat melakukan transaksi ekonomi lebih efisien dengan memberikan pihak mengakses informasi, memungkinkan mereka untuk mengkoordinasikan kegiatan yang saling menguntungkan, dan mengurangi perilaku oportunistik melalui transaksi berulang (Dasgupta, 1988). Modal sosial memainkan peran penting dalam membentuk hasil dari tindakan ekonomi baik di tingkat mikro dan makro (Rodrik, 1998)(John Fied, 2014)

Pembangunan ekonomi di tingkat mikro misalnya pada tingkat keluarga; modal sosial digunakan di antara orang miskin untuk memastikan diri terhadap guncangan. Seperti kesehatan yang buruk, cuaca buruk

atau pemotongan pemerintah dan sumber daya mereka, seperti makanan, kredit atau anak. Selain memungkinkan orang miskin untuk memulai usaha kecil dan meningkatkan pendapatan mereka, hubungan informal sering berarti perbedaan antara hidup sehari-hari dan putus asa(Fountain 1998). Di tingkat masyarakat di Tanzania, modal sosial di tingkat masyarakat yang terkena dampak kemiskinan dengan membuat layanan pemerintah yang lebih efektif, memfasilitasi penyebaran informasi pertanian, memungkinkan kelompok untuk sumber daya mereka dan mengelola properti sebagai koperasi, dan memberikan orang akses ke kredit yang telah secara tradisional terkunci dari lembaga keuangan formal (Narayan 1997).

Pembangunan ekonomi di Tingkat Makro; Modal sosial masyarakat tingkat sangat penting dalam menentukan bagaimana fungsi pemerintah (Putnam; 1993) dan apa jenis sektor swasta berkembang dalam perekonomian (Fukuyama; 1995). Pada sektor publik; Partisipasi negara yang konstruktif dalam pembangunan ekonomi bergantung pada keseimbangan antara ikatan sosial eksternal dan kekompakan internal. Idealnya, sangat terampil dan dihormati birokrasi negara memanfaatkan hubungan kerja yang erat dengan para pemimpin bisnis untuk meningkatkan kinerja pasar organisasi sektor swasta dan publik. Efektivitas pemerintahan, akuntabilitas dan kemampuan untuk menegakkan aturan cukup berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi mengaktifkan atau menonaktifkan perkembangan perusahaan domestik dan pasar dan mendorong atau mengecilkan investasi asing (Rodrik; 1997, Putnam; 1993).

Pada Sektor swasta ;Fukuyama (1995) menemukan bahwa jaringan sosial yang lebih luas dari Amerika Serikat dan Jerman menghasilkan lebih banyak perusahaan besar daripada masyarakat seperti China, di mana

jaringan keluarga membentuk dasar dari perusahaan swasta.

Bersamaan mendorong pembangunan ekonomi di tingkat mikro dan makro sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan dan mengurangi kemiskinan dengan cara yang berkelanjutan (The World Bank, 2011).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran (2008) dengan lokasi penelitian mencakup seluruh Bakorwil di Jawa Barat, dan beberapa Kabupaten/Kota yang mewakili Bakorwil di Jawa Barat. Mempertimbangkan kriteria kondisi daerah yang bersifat perkotaan (*urban*), perdesaan (*rural*), perbatasan, daerah pertanian, dan daerah pesisir sebagai dasar dalam penentuan lokasi penelitian. Tertuang sejumlah rekomendasi untuk mengoptimalkan modal sosial dalam penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut: 1) Intervensi kebijakan untuk mengoptimalkan modal sosial dapat dilakukan pada level mikro, melalui pemberdayaan keluarga, tetangga, kelompok pengajian, dan sebagainya; 2) Pada umumnya komunitas dari strata ekonomi yang lebih mapan, kesulitan menyalurkan barang-barang bekas layak pakai. Selama ini, biasanya, mereka langsung memberikan pada komunitas yang dianggap lebih tidak mampu. Kegiatan ini, selain tidak terorganisir dengan baik, juga tidak mengandung makna pemberdayaan, selain hanya faktor menyumbang semata. Maka, yang dapat dilakukan misalnya barang-barang bekas layak pakai dikumpulkan, disortir dan dijual dengan harga murah. Hasil penjualan dijadikan dana bergulir, untuk *micro-credit* atau kegiatan *social safety net* lainnya. Pengelolaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dilakukan secara mandiri oleh masyarakat yang bersangkutan dari strata sosial-ekonomi yang berbeda; 3) Titik berat peningkatan kapasitas dapat difokuskan pada tokoh agama, tokoh pendidikan, dan tokoh kesehatan yang

selama ini masih dipercaya oleh masyarakat. Keberadaan tokoh-tokoh ini dapat digunakan sebagai pendorong perubahan dalam modal sosial, dalam upaya mengubah relasi sosial yang kaku (transaksional) menjadi lebih luwes dan membangun jejaring kerja yang lebih luas serta kegiatan partisipasi yang lebih otonom. Kapasitas modal sosial yang tersedia dalam masyarakat belum secara optimal dimanfaatkan untuk penanggulangan kemiskinan karena kelompok-kelompok yang tersedia memiliki keterbatasan akses untuk memberdayakan anggotanya. Selain itu, untuk perluasan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan aktualisasi diri, pada umumnya masyarakat mendapatkan informasi dari keluarga, teman, dan tetangga, sedangkan untuk minta bantuan, pada umumnya mencari bantuan dari kelompok masyarakat yang strata ekonominya setara (Lembaga Penelitian Unpad, 2008).

Paper Isabella Santini and Anna De Pascale, *Social Capital and Household Poverty: The Case of European Union*, (Working Paper 109, Università degli Studi di Roma, La Sapienza) juga menyatakan adanya hubungan yang kuat antara modal sosial dan kesejahteraan ekonomi rumah tangga, khususnya sejauhmana persepsi kemiskinan yang bersangkutan, merujuk pada makalah penelitian New Italia. Makalah ini melihat sumber data resmi Uni Eropa, fokus pada dua set variabel: satu variabel sebagai *proxy* masyarakat dan kontribusi modal sosial dalam rumah tangga, dan satu lagi menggambarkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Temuannya diantaranya adalah; Korelasi kuat ditemukan antara kesejahteraan ekonomi rumah tangga dan berbagai faktor seperti kualitas perumahan, kondisi lingkungan/ketertinggalan, dan tingkat kriminalitas. Kesejahteraan rumah tangga umumnya meningkat seiring dengan tingginya tingkat modal sosial. Model yang bertujuan menangkap hubungan diperlukan,

namun untuk memperhitungkan kemungkinan kausalitas terbalik, dimana tingkat pendapatan menentukan bentuk kontribusi modal sosial. kebijakan anti-kemiskinan harus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga dengan memfasilitasi atau mendukung pengembangan bentuk-bentuk modal sosial yang diinginkan. • Penelitian lebih lanjut harus berusaha untuk mengidentifikasi karakteristik kondisi sosial ekonomi individu / rumah tangga, dan kontribusi modal sosial pada masyarakat / rumah tangga, dan lebih mengarahkan pada pengaruh kemiskinan rumah tangga. Ini akan membantu untuk mengungkapkan faktor risiko utama (Santini, n. d.).

Penelitian yang dilakukan Mukaila, Ijaiya, Sakariyau, Dauda, Paiko & Zubairu mengenai modal sosial dan pengurangan kemiskinan di Nigeria: suatu studi kasus Minna Metropolis tahun 2012. Situasi ekonomi yang berlaku di Nigeria dan pentingnya modal sosial sebagai suatu solusi untuk interaksi sosial memberikan bukti relevansi modal sosial untuk mengurangi kemiskinan yang terjadi di Minna metropolis. Modal sosial dideskripsikan sebagai suatu konsep yang sukar dipahami secara empiris, namun telah digembar-gemborkan sebagai perekat komunitas bersama.

Meskipun banyak perdebatan mengenai definisi modal sosial (Winter, 2000). Makalah inimeneliti peran modal sosial dalam pengurangan kemiskinan di Minna metropolis. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwamodal sosial positif berkaitan dengan pengurangan kemiskinan di kota metropolis, dengan demikian, memenuhi apriori kami yang menyatakan bahwa Negara yang pembangunan modal sosialnya lebih oleh orang-orang di metropolis, menemukan jalan keluar dari kemiskinannya. Disarankan pengukuran kebijakan yang akan dilanjutkan adalah

membuat modal sosial lebih relevan dengan pengurangan kemiskinan (Mukaila et all, 2012).

Di Indonesia salah satu contoh pemanfaatan modal sosial adalah pada kelompok yang melakukan usaha bersama. Pertama, keberadaan modal sosial didukung oleh aktor-aktor dalam suatu arena untuk mencapai tujuan tertentu. Aktor-aktor tersebut memainkan peran sesuai dengan rules yang telah disepakati bersama. Sejumlah orang memberikan jasa dalam kegiatan-kegiatan tertentu, aktor-aktor membentuk jejaring yang saling menguatkan satu sama lain (*interdependensi*), karena itu tidak mudah diintervensi atau ditarik oleh pihak luar. Kedua, keberadaan modal sosial membutuhkan kejelasan basis ikatan sosial. Ikatan sosial berbasis daerah (*locality*) atau campuran diantara ketiganya. Ikatan sosial yang mereka kembangkan berbasis daerah (*locality*) sekaligus kekerabatan (*kindship*). Ikatan sosial ini membuat hubungan yang terjalin diantara mereka menjadi lebih erat dibandingkan dengan hubungan yang terjalin dengan pihak luar. Mereka mengembangkan in group feeling dengan jargon-jargon tertentu yang hanya diketahui oleh kalangan sendiri. Mereka mengembangkan tradisi hidup bersama dalam rasa sepenanggungan, atau dengan *sense of community* yang tinggi. Ketiga, modal sosial dikembangkan melalui institusi sosial yang di dalamnya terdapat relasi-relasi multi dimensi, dalam arti bukan hanya relasi-relasi sosial yang terkait dengan kepentingan ekonomi, tetapi juga berbaur dengan hubungan pertemanan (*friendship*), kekerabatan (*kindship*), keagamaan bahkan kepentingan politik. Relasi multi dimensi semacam itu semakin memperkuat risk-sharing (membagi resiko). Keempat, modal sosial dibangun, dipelihara dan dikembangkan melalui proses yang melibatkan aktor, ikatan sosial dan institusi sosial. (usman 69-77)

Sebagaimana sudah disinggung, munculnya usaha bersama untuk tujuan produktif pada awalnya tidak selalu atas prakarsa masyarakat, akan tetapi dapat merupakan inisiasi dari luar yang kemudian terinstitusionalisasi. Pada perkembangan terakhir, banyak program pengentasan kemiskinan yang merupakan program dari pemerintah tetapi dalam pelaksanaannya menumbuhkan institusi dari masyarakat sendiri untuk mengelolanya. Program ini dirancang bukan sebagai bagian dari tindakan karitatif atau tindakan darurat sebagai jaringan pengaman sosial, melainkan program yang ingin menumbuhkan kapasitas masyarakat untuk mampu mengelola usaha produktif secara mandiri dan berkesinambungan (Soetomo, 270).

Program-program tersebut dalam implementasinya menggunakan strategi *community development*. Walaupun demikian apakah misi program ini tercapai sangat tergantung dari apakah institusi yang diinisiasi dari luar tersebut mampu berkembang menjadi bagian dari pola aktivitas masyarakat yang melembaga. Dengan perkataan lain, telah terjadi proses institusionalisasi yang dalam jangka panjang lebih menjamin keberlanjutan dan kemandirian walaupun intervensi dari luar sudah dihentikan.

Pada sisi lain, dijumpai juga berbagai tindakan bersama yang hasilnya tidak secara langsung mempengaruhi peningkatan taraf hidup. Bentuknya merupakan usaha yang dirancang dan dilaksanakan oleh masyarakat sendiri untuk membangun berbagai prasarana produksi misalnya bendungan sederhana dan saluran air, prasarana perhubungan dan prasarana pemasaran seperti pasar desa. Disamping itu juga tidak jarang keberadaan modal sosial tersebut menjadi energi bagi tindakan bersama untuk pengadaan fasilitas

umum yang lain seperti gardu ronda, tempat mandi umum, balai pertemuan. Tanpa mengurangi arti penting berbagai hasil yang berupa bangunan fisik tersebut, maka dilihat dari kebutuhan keberlanjutan tindakan bersama tadi, akan lebih menguntungkan apabila yang berhasil dibangun adalah institusi sosial seperti koperasi, kelompok usaha, komite desa dan sejenisnya.

Walaupun masyarakat mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha penanganan masalah sosial secara mandiri dan untuk itu perlu selalu ditingkatkan kapasitasnya melalui upaya pemberdayaan, hal itu tidak berarti menghilangkan tanggungjawab Negara dalam penanganan masalah sosial. Kemampuan Negara justru perlu selalu ditingkatkan, terutama dalam memberikan prioritas perhatian terhadap penanganan masalah sosial dan upaya perwujudan kesejahteraan sosial. Negara idealnya dapat memberikan berbagai bentuk pelayanan sosial secara lebih optimal, dapat memberikan jaminan kesejahteraan terutama bagi warga masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Untuk menjalankan peran tersebut Negara justru harus berusaha memperkuat diri termasuk dalam alokasi anggaran kesejahteraan sosial.

Sebaliknya, masyarakat juga perlu diberi peluang yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan terutama bagi hal-hal yang menyangkut pengelolaan tindakan bersama dalam lingkungan komunitasnya. Untuk hal-hal seperti itu Negara perlu mengurangi perannya dalam pengambilan keputusan yang sentralistis dan *top down*. Dengan demikian dalam upaya penanganan masalah sosial ini perlu didudukan secara proporsional, dalam hal apa peran Negara harus diperkuat dan dalam hal apa peran Negara perlu dikurangi sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat. (Soetomo, 273-4)

Modal sosial banyak digunakan dalam kebijakan pembangunan, sebagian sebagai akibat dari minat yang ditunjukkan oleh Bank Dunia. Namun, sebagaimana argument Katherine Rankin, daya tariknya (modal sosial) terletak pada kapasitasnya untuk memobilisasi jaringan sosial local untuk mengatasi masalah-masalah kemiskinan, misalnya dalam preferensi terhadap strategi yang berakar lokal seperti program pendanaan mikro (Field, 2014; 215)

PENUTUP

Modal sosial lebih menekankan kepada kebersamaan dan energi sosial dalam suatu masyarakat. Modal sosial merupakan kekuatan yang membentuk suatu jaringan sosial sesama kaum miskin untuk bahu-membahu mengentaskan kemiskinan dengan memanfaatkan solidaritas sosial untuk mengatasi keterbatasan modal material. Sebagaimana yang telah dikemukakan Chambers bahwa salah satu dimensi kemiskinan adalah dimensi hubungan sosial, dalam hubungan sosial terkandung modal sosial. Alternative pengurangan kemiskinan salah satunya dapat diatasi dengan memanfaatkan modal sosial pada kelompok miskin sebagai energy dan atau kapasitas melalui peningkatan dan pemanfaatan jejaring (networks) untuk membentuk kelompok usaha bersama yang produktif guna meningkatkan penghasilan kelompok miskin yang pada akhirnya terjadi kesejahteraan akan terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Usman, Sunyoto. (2015). *Esai-Esai Sosiologi Perubahan Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Field, John. (2014). *Modal Sosial*. Bantul : Kreasi Wacana Offset.
- Tantoro, Swis. (2014). *Pembasmian Kemiskinan Perspektif Sosiologi - Antropologi*.

Yogyakarta : Pustaka Pelajar

- Soetomo. (2010). *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers
- Maipta, Indra. (2014). *Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Suharto, Edi. (2013). *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia Menggagas Model Jminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. Bandung: Alfabeta

Internet

- Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran & Bappeda Propinsi Jawa Barat. (2008). *Pemetaan dan Pemanfaatan Modal Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Barat*. http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/06/pemetaan_dan_pemanfaatan_modal_sosial.pdf
- The World Bank. (2011). *Social Capital in Poverty Reduction and Economic Development*. <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALDEVELOPMENT/EXTSOCIALCAPITAL/0,,contentMDK:20186616~menuPK:418214~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:401015,00.html>
- Mukaila, Ijaiya, Sakariyau, Dauda, Paiko, Zubairu. (2012). Social Capital and Poverty Reduction in Nigeria: A Case Study of Minna Metropolis. *International Journal of Business and Social Science*. Vol. 3 No. 12 [Special

Issue June 2012, 229). http://ijbssnet.com/journals/Vol_3_No_12_Special_Issue_June_2012/23.pdf

Santini Isabela and Anna De Pascale. *Social Capital and Household Poverty: The Case of European Union*, Working Paper 109, Universita degli Studi di Roma (La Sapienza). (n.d). Strong link' between social capital and poverty PSE TEAM <http://www.poverty.ac.uk/report-poverty-measurement-europe/%E2%80%98strong-link%E2%80%99-between-social-capital-and-poverty>

Ariyanti, Fiki. (2015). *Jumlah orang miskin diprediksi naik hingga 15 juta pada 2015 ini*. <http://bisnis.liputan6.com/read/2321940/jumlah-orang-miskin-diprediksi-naik-hingga-15-juta-pada-2015-ini>

Kelana, Irwan. (2015). *Tantangan Kemiskinan pada 2015*. <http://www.republika.co.id/berita/koran/pareto/15/01/02/nhjny6-tantangan-kemiskinan-pada-2015>